



BK
PSDM
KABUPATEN GRESIK

2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK**



www.bkpsdm.gresikkab.go.id



[bkpsdmgresikkab](https://www.instagram.com/bkpsdmgresikkab)



bkpsdm@gresikkab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Renja awal, serta sebagai respons atas dinamika kebutuhan pembangunan daerah yang harus segera diakomodasi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025, memuat Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta mengakomodir masukan dari para *stakeholder*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Akhir kata, besar harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Gresik, 25 Juli 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK**



AGUNG ENDRO D.S. UTOMO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19760305 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2022.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	26
2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional	27
2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	28
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.2.1 Tujuan	46
3.2.2 Sasaran.....	47
3.3 Program dan Kegiatan.....	49



IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
V. PENUTUP.....	71
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	71
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Gresik....	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	25
Tabel 2.3	Review terhadap Perubahan APBD Tahun 2025	32
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	39
Tabel 2.7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	53
Tabel 2.8	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Gresik Tahun 2025	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik Tahun 2025 memuat kebijakan pembangunan, sasaran, serta uraian program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dilakukan sebagai respons terhadap hasil evaluasi kinerja Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025, yang menunjukkan perlunya penyesuaian pada aspek perencanaan, efisiensi anggaran, serta peningkatan efektivitas program strategis seperti pengembangan kompetensi ASN, reformasi birokrasi, dan penguatan manajemen kepegawaian daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan mempertimbangkan keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021–2026 sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Peraturan Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada kebutuhan, penjangkaran aspirasi (*bottom up*) melalui musyawarah perencanaan

pembangunan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum PD) yang melibatkan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta *stakeholders* terkait. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Ranwal Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;

21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;
23. Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/57/HK/437.12/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024;
24. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 adalah sebagai dokumen resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 serta untuk memberikan gambaran perencanaan tahunan secara resmi dalam rangka pelaksanaan program kerja BKPSDM juga sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik dan Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
--------------	--------------------

berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Ranwal Renja, landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM, maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM, dan sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM.

BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
---------------	---

berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan evaluasi capaian kinerja program dasar Triwulan I tahun berjalan, capaian Renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta reuiu terhadap perangkat daerah.

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
----------------	--

berisi uraian yang menjelaskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yakni uraian tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Ranwal Renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
---------------	---

berisi rumusan rencana program dan kegiatan BKPSDM untuk Tahun 2025 serta perkiraan maju pada Tahun 2026.



BAB V | PENUTUP

merupakan bab penutup yang berisi simpulan terhadap Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPSDM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dan Capaian Renstra BKPSDM Triwulan I Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun dan merupakan perubahan dari Renja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang memuat kebijakan pembangunan, sasaran, serta uraian program, kegiatan, serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 guna mencapai sasaran strategis dan mendukung tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan atas capaian Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025, laporan hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, laporan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan yang baru disahkan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Triwulan I BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2023, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Program atau Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

2. Realisasi Program atau Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- f. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- g. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- h. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- i. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
 - Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- j. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- k. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan



3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya, target kinerja program atau kegiatan

Pada pelaksanaan APBD Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Gresik mengalami beberapa kali pengurangan anggaran dan adanya arahan efisiensi anggaran pada akhir tahun sehingga banyak kegiatan program yang tidak terlaksana. Sedangkan anggaran BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2023 mengalami pengurangan sebesar 30,39% atau hampir mencapai 4,4 Miliar Rupiah dari APBD Murni Tahun 2023. Dengan adanya pengurangan anggaran tersebut menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2023. Sehingga pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan anggaran untuk tetap memenuhi target kinerja yang sudah direncanakan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Berdasarkan pencapaian di atas diketahui bahwa kegiatan yang tidak tercapai atau realisasi kurang dari 100% adalah salah satu kegiatan inti dari pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM. Adanya efisiensi arahan menyebabkan kegiatan banyak yang tidak bisa dilaksanakan.

5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. BKPSDM Kabupaten Gresik selalu melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan



kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang. Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum berhasil berkinerja 100% akan dievaluasi, sehingga seluruh Kegiatan dan Sub Kegiatan akan tercapai 100% pada tahun berikutnya.

Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota						100%	100%						
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					a. Jumlah Dokumen Renja dan SOP b. Jumlah dokumen perencanaan PD	a. 120 Buah b. 24 Dok	a. 90 Buah b. 6 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	6 Dok	2 Dok	58%
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					a. Jumlah Laporan SKPD (LKjIP, LPPD, Laporan Monev APBD dan SAKIP) b. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. 55 Buah b. 48 Lap	a. 25 Buah b. 12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	3 Lap	56%
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					a. Jumlah Pembayaran Gaji Pegawai dan TPP selama setahun b. Jumlah Orang yang menerima gaji	a. 24 Bulan b. 220 Pegawai	a. 24 Bulan b. 55 Pegawai	55 Pegawai	55 Pegawai	100%	55 Pegawai	55 Pegawai	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	a. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun b. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72 Lap	36 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	3 Lap	71%
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	a. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran Tahun yang tersusun b. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	204 Lap	66 Lap	3 Lap	3 Lap	100%			100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Jumlah ATK b. Jumlah Peralatan Kantor c. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. 80 Jenis b. 56 Unit c. 12 Paket	a. 80 Jenis b. 50 Unit c. 3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	-	50%
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman b. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	a. 2.754 Porsi b. 100 Paket	a. 1.496 Porsi b. 23 Paket	25 Paket	25 Paket	100%	25 Paket	5 Paket	53%
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Jumlah Barang Cetakan yang tersedia selama setahun b. Jumlah Paket Barang Cetakan yang tersedia selama setahun	a. 38 Jenis b. 49 Paket	a. 38 Jenis b. 10 Paket	13 Paket	13 Paket	100%	13 Paket	-	47%
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Surat Kabar yang trsedia selama setahun	a. 6 Jenis b. 12 Dok	3 Dok	3 Dok	9 Dok	100%	3 Dok	-	100%
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Jumlah Perjalanan Dinas yang	a. 210 Kali b. 60 Lap	a. 162 Kali b. 12 Lap	80 Lap	33 Lap	41%	80 Lap	-	75%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						terlaksana selama setahun b. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Jumlah Tenaga Non ASN yang dibayar selama setahun b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	a. 8 Orang b. 16 Lap	a. 8 Orang b. 4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	4 Lap	1 Lap	56%	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional pada BKPSDM yang terpelihara selama setahun b. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Kendaraan	7 Kendaraan	11 Kendaraan	7 Kendaraan	100%	11 Kendaraan	7 Kendaraan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 01 2.09 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a. Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara selama setahun b. Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	566 Kali	303 Kali	80 Kali	80 Kali	100%	90 Kali	-	68%
5 03 02	Program Kepegawaian Daerah		100%							
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	a. Jumlah Dokumen bezzeting b. Jumlah Pendaftar CPNS dan PPPK c. Jumlah penerima SK CPNS dan PPPK d. Jumlah peserta bintal CPNS dan PPPK e. Jumlah peserta ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah f. Jumlah dokumen hasil penyusunan kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan	a. 120 Dok b. 25.000 Org c. 1.537 Org d. 1.537 Org e. 500 Org f. 12 Dok	a. 62 Dok b. 2.102 Org c. 2.102 Org d. 690 Org e. 500 Org f. 3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	1 Dok	58%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						untuk pelaksanaan pengadaan ASN									
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	a. Fasilitas OPD yang dimonitoring b. Jumlah ASN yang dibina minat bakat c. Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani d. Jumlah Penyelenggaraan HUT KORPRI e. Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	a. 104 OPD b. 60 ASN c. 50 ASN d. 2 Kali e. 1 Lembaga	a. 52 OPD b. 23 ASN c. 23 ASN d. 1 Kali e. 1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	-	100%	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. Jumlah Pemeliharaan Aplikasi b. Jumlah Kegiatan Verifikasi Data Kepegawaian c. Jumlah DOKumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	a. 4 Aplikasi b. 4 Kali c. 8 Dok	a. 4 Aplikasi b. 2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	-	50%	



Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
										Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	a. Jumlah SK Pengangkatan PPPK, Jumlah SK Pengangkatan PNS, Jumlah Peserta Tes Kesehatan CPNS, dan Jumlah SK Kenaikan b. Jumlah Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja PNS c. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	a. 2.750 Org b. 50 Lap c. 16 Dok	a. 1.236 Org b. 28 Lap c. 4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	1 Dok	56%
5	03	02	2.02	01		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	a. Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat, Jumlah ASN yang menerima SK Pangkat Pengabdian/ SK	a. 12.769 Org b. 112 Dok	a. 10.586 Org b. 28 Dok	28 Kali	28 Kali	100%	28 Kali	7 Kali	56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Pensiun, Jumlah ASN yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala, Jumlah ASN yang bisa menghitung angka kredit. b. Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat								
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Promosi ASN	a. Jumlah hasil uji kompetensi PNS b. Jumlah JPT Pratama yang lowong c. Jumlah Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional d. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	a. 522 Org b. 13 Jabatan c. 12 Kali d. 19 Dok	a. 66 Org b. 10 Jabatan c. 11 Kali d. 6 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	5 Dok	-	42%
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	a. Jumlah Peserta Uji Kesehatan bagi Aparatur maupun PNS sakit menahun b. Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	a. 350 Org b. 20 Org	a. 106 Org b. 5 Org	5 Org	5 Org	100%	5 Org	1 Org	55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				a. Jumlah ASN yang memiliki penilaian kinerja baik b. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	a. 250 Org b. 12 Dok	a. 199 Org b. 3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	-	50%
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				a. Jumlah Peserta Bimtek Purna Tugas b. Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya c. Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, BPJS, Tapera, dan Klaim JKK-JKM yang dilayani d. Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	a. 722 Org b. 1.100 Org c. 1.000 Org d. 5.530 Org	a. 1.336 Org b. 1.707 Org c. 1.184 Org	1.400 Org	961 Org	69%	1.400 Org	15 Org	39%
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN				Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	515 Org	159 Org	95 Org	0 Org	0%	95 Org	-	31%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian	37 Lap	22 Lap	5 Lap	5 Lap	100%	5 Lap	-	73%
5 04 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		100%							
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	a. Jumlah Peserta Diklat Teknis b. Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, PD penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	c. 580 Org d. 8 Dok	a. 192 Org b. 2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	6 Lap	1 Lap	63%
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan	a. Jumlah peserta Pelatihan	a. 255 Org b. 2.400 Org	a. 790 Org b. 6 Lap	6 Lap	6 Lap	100%	-	-	33%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kepemimpinan Pengawas, jumlah pelatihan kepemimpinan administrator, dan jumlah pelatihan kepemimpinan nasional b. Jumlah peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS c. Jumlah peserta Diklat Calon Kepala Sekolah d. Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	c. 300 Org d. 36 Lap							



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Triwulan I Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Tugas Belajar Selama setahun	30 Org	4						13%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran strategis BKPSDM Kabupaten Gresik sebagaimana yang telah di targetkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah Meningkatkan Tata Kelola Manajemen SDM Aparatur yang Professional dan Berbasis Sistem Merit dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas dan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	-	50	55	57	60	62	65	53,08	89,74	90	92	Pelaksanaan GREAT ASN (Gresik Satu Data Aparatur Sipil Negara) dan Sinkronisasi Aplikasi SIMPEG dengan SIASN memiliki dampak yang besar terhadap capaian Indikator Kompetensi pada penilaian IP ASN Tahun 2023
2	Indeks Sistem Merit	-	-	200 (Kurang Baik)	250 (Baik)	275 (Baik)	300 (Baik)	324 (Baik)	335 (Sangat Baik)	253	300,5	305	325	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BKPSDM adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka pelayanan kinerja BKPSDM Kabupaten Gresik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025, aparatur di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan : 1 orang
2. Sekretaris Badan : 1 orang
3. Kepala Bidang : 4 orang
4. Kepala Sub Bagian : 2 orang
5. Fungsional Tertentu : 10 orang
6. Fungsional Umum : 32 orang

2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Adapun permasalahan dalam pelayanan BKPSDM Kabupaten Gresik diantaranya:

1. Kualitas data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG yang belum mutakhir;
2. Pelaksanaan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit masih belum optimal;
3. Belum terlaksananya pengembangan karier menggunakan sistem manajemen talenta;
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN belum disusun berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi; dan
5. Masih sedikitnya pelaksanaan Diklat ASN dikarenakan keterbatasan anggaran.

Sedangkan faktor-faktor penghambat:

1. Kapasitas, kualitas, kuantitas, dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Adanya perubahan Kebijakan Nasional, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;
3. Terbatasnya pagu anggaran untuk pelaksanaan diklat; dan
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana (Gedung Diklat Mandiri).

2.3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

BKPSDM Kabupaten Gresik mendukung pernyataan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu: **Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Kharimah.**

Terkait dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Gresik dalam penyusunan Renstra berdasarkan Misi ke-1 yakni: ***"Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif"***

Komitmen mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, selaras dengan tujuan besar Reformasi Birokrasi di Indonesia. Prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif mensyaratkan bahwa pemerintah tidak hadir dan bekerja sendirian dalam menjalankan proses pembangunan, namun menjalankan tata kelola pemerintahan dimana pemerintah menempatkan tiga pilar *good governance* yaitu *civil society* sebagai aktor-aktor strategis pembangunan, wirausahawan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang terbuka dan pemerintahan yang transparan, responsif dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional, disiplin dan berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), sampai kepada adanya



pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. BKPSDM melalui program, kegiatan dan sub kegiatan berusaha melakukan kinerja manajemen SDM aparatur sebaik-baiknya untuk menghasilkan SDM aparatur yang professional dan akuntabel sehingga mampu mendukung terwujudnya misi tersebut.

Kinerja BKPSDM menjadi salah satu poin dalam 8 area perubahan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini menjadi indikator keberhasilan tujuan pembangunan Kabupaten Gresik. Indeks Reformasi Birokrasi yang didalamnya terdapat penataan Sumber Daya Manusia juga merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BKPSDM, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, tujuannya untuk mempertajam kebijakan pelayanan BKPSDM untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

- a. Peningkatan pelayanan informasi kepegawaian yang cepat, murah, dan mudah diakses;
- b. Peningkatan Pengembangan Kompetensi ASN;
- c. Penerapan Manajemen Talenta ASN; dan
- d. Penerapan Konsep *Smart* ASN untuk mewujudkan *World Class Government*.

2. Peluang

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- c. Telah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang berbasis digital sehingga mempermudah pelayanan kepegawaian; dan
- d. Telah tersedianya Unit Pembantu urusan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.

Melalui metode analisis SWOT, akan diidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) pada penyelenggaraan pelayanan di BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun hasil analisis menggunakan metode SWOT sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

- a. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas;
- b. Dasar hukum yang jelas atas pelaksanaan kegiatan;
- c. Komitmen Atasan yang didukung oleh seluruh pegawai untuk terus melakukan perbaikan; dan
- d. Koordinasi yang baik antar Bidang dan *Stakeholders*.

2. *Weaknesses* (Kelemahan)

- a. Kualitas data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG yang belum mutakhir;
- b. Pelaksanaan Manajemen SDM berbasis Sistem Merit masih belum optimal;
- c. Belum terlaksananya pengembangan karier menggunakan sistem manajemen talenta; dan
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN bergantung pada instansi penyelenggara.

3. *Opportunity* (Peluang)

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;



- c. Telah tersedianya sistem informasi kepegawaian yang berbasis digital sehingga mempermudah pelayanan kepegawaian; dan
 - d. Telah tersedianya Unit Pembantu urusan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
4. *Threat* (Ancaman)
- a. Kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dan yang tersedia;
 - b. Terbatasnya pagu anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan diklat; dan
 - c. Belum tersedianya sarana dan prasarana (Gedung Diklat Mandiri).

2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan

Rekomendasi berkenaan dengan peran BKPSDM Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan setelah dikaitkan dengan Visi dan Misi Bupati Gresik dan Telaahan Kebijakan Nasional, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG secara berkala;
2. Pemenuhan formasi kebutuhan pegawai melalui pengadaan CPNS dan PPPK;
3. Peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan diklat, bimtek, *workshop*, atau yang lain;
4. Pelaksanaan pelayanan kepegawaian berbasis elektornik; dan
5. Pelaksanaan sistem merit dan manajemen talenta.

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka strategi BKPSDM dalam mewujudkan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik termasuk jabatan fungsional akibat penyetaraan jabatan;



2. Melaksanakan manajemen SDM aparatur berbasis sistem merit dan manajemen talenta;
3. Optimalisasi pelaksanaan GREAT ASN dengan cara melakukan sosialisasi pembaruan data kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG bagi seluruh pegawai;
4. Meningkatkan kinerja ASN melalui penerapan *Reward and Punishment*; dan
5. Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi dan pemetaan jabatan.

2.4 Reviu Terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) RKPD

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2025 merupakan respons terhadap hasil evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan Pertama Tahun 2025. Perubahan APBD Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik. Disamping itu juga, Dokumen Ranwal Renja Tahun 2025 yang disusun ini juga memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan rencana capaiannya.

Melalui Dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun *review* terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.713.257.571	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				16.993.065.634,55	
	KEPEGAWAIAN				15.048.179.745	KEPEGAWAIAN				12.289.040.692,05	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				9.686.362.385	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				9.803.455.790,05	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				254.494.599	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.672.376,87	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	24.303.343	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dok	24.675.100,50	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	230.191.256	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gresik	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Lap	29.997.276,37	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.086.892.256	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.301.943.786,46	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	7.080.978.750	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gresik	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 Pegawai	8.299.382.114,46	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Lap	5.913.506	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Lap	2.561.672,00	

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	36 Lap	0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.811.016.930	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.074.661.226,72	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	299.786.165	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	3 Paket	118.752.734,00	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	84.210.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gresik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Paket	49.689.420,00	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	146.064.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gresik	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	71.172.200,00	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	13.608.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kab. Gresik	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 Dok	3.213.000,00	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	80 Lap	196.538.572,00	

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	1.017.348.165	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Kab. Gresik	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	1 Dok	635.295.300,72	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				258.740.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.134.000,00	
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	258.740.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gresik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan	4 Lap	175.134.000,00	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				275.218.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.044.400,00	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Kendaraan	256.918.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gresik	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Kendaraan	189.724.400,00	
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Kali	18.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Gresik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	90 Kali	7.320.000,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.361.817.360	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.485.584.902,00	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1.277.748.831	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				434.451.578,00	
15	Penyusunan Rencana	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan	3 Dok	920.066.216	Penyusunan Rencana	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil penyusunan	3 Dok	315.502.265,00	

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
	Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN			Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN			
16	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	110.561.791	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Gresik	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	36.051.400,00	
17	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 Dok	247.120.824	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	2 Dok	82.897.913,00	
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					1.040.997.034	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN					865.522.834,00
18	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanan dan mutasi ASN antar daerah	4 Dok	170.032.796	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanan dan mutasi ASN antar daerah	4 Dok	39.845.646,00	
19	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	449.445.450	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Gresik	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	28 Kali	171.022.400,00	
20	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5 Dok	421.518.788	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	5 Dok	654.654.788,00	

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				2.450.943.990	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				39.845.646,00	
21	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	171.022.400,00	44.710.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	5 Org	35.600.000,00	
22	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	654.654.788,00	956.216.886	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	1 Dok	785.602.886,00	
23	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dok	71.868.800	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	1 Dok	0	
24	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	1.378.148.304	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Gresik	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	1 Dok	141.400.000,00	
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				592.127.505	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				223.007.604,00	
25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	49.266.469	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Gresik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	3 Dok	12.198.014,00	
26	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	423.674.996	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1.400 Org	202.309.590,00	
27	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	100.719.540	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Gresik	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	95 Org	8.500.000,00	
28	Pengelolaan Penyelesaian	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian	5 Lap	18.466.500	Pengelolaan Penyelesaian	Kab. Gresik	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian	5 Lap	0	

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
	Pelanggaran Disiplin ASN		pelanggaran disiplin ASN			Pelanggaran Disiplin ASN		pelanggaran disiplin ASN			
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.665.077.826	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.704.024.942,50	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.665.077.826	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.704.024.942,50	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				1.391.838.241	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				544.375.160,00	
29	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kebijakan	1.391.838.241	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Gresik	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun	2 Kebijakan	544.375.160,00	
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5.273.239.585	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				4.159.649.782,50	
30	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 Lap	5.273.239.585	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Kab. Gresik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan	2 Lap	4.159.649.782,50	

No	APBD					Perubahan APBD					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target 2025	Kebutuhan Dana	
	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan			



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah

BKPSDM sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berkewajiban juga menyusun Perubahan APBD Tahun 2025 yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh dari hasil musrenbangcam, musrenbangkab dan data internal BKPSDM. Adapun usulan tersebut dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mencakup beberapa arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dengan strategi meliputi:
 - a. Penguatan implementasi manajemen ASN dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan nasional, pengembangan pola karir nasional, dan pelaksanaan manajemen ASN yang memperhatikan kekhususan daerah dan masyarakat. Peningkatan kualitas manajemen ASN melalui: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN, dan (c) Penyusunan pola karir instansional;
 - b. Peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansi, (b) implementasi arsitektur SPBE instansi, dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi;

- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi, (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Penerapan (menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan di Unit Pelayanan Publik (UPP) tertentu, (b) Percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan public, (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di UPP tertentu, (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan public, (e) Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), dan (f) Integrasi penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D
2. Terwujudnya arsitektur jaringan kerja pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif, dengan arah kebijakan penataan proses bisnis internal instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dan institusi pemerintah dengan non-pemerintah serta pelibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, dengan strategi meliputi:
- a. Penataan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (pusat, pusat-daerah, daerah-daerah), intra institusi pemerintah dalam bentuk pemetaan mekanisme ketatahubungan antar instansi pemerintah (*Institutional Mapping*) dan penyusunan SOP strategis per dimensi pembangunan;
 - b. Penguatan mekanisme kerjasama dengan non-pemerintah dalam bentuk pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan;
 - c. Pengarusutamaan kebijakan SPBE di seluruh K/L/Pemerintah Daerah.
3. Terwujudnya organisasi yang responsif dan adaptif, dengan arah kebijakan penataan organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional dengan strategi meliputi:

- a. Penataan organisasi pemerintah berbasis prioritas pembangunan nasional dalam bentuk restrukturisasi desain kelembagaan pemerintah pusat dan daerah (*structure follow strategy*);
 - b. Pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang handal dan efektif, melalui penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi serta penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel.
4. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik, dengan strategi meliputi:
 - a. Pemanfaatan *Information and Communication Technologies* (ICT) dalam pelayanan publik dalam bentuk penguatan penerapan *e-services* dan pemenuhan standar pelayanan publik;
 - b. Pemanfaatan *Big Data* dalam pelayanan publik dalam bentuk optimalisasi pemanfaatan data bersama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik;
 - c. Kerjasama multipihak dalam pelayanan publik yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat dalam bentuk pengembangan kerjasama pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (*coproduction*);
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dalam bentuk perluasan pelayanan terpadu/terintegrasi;
 - e. Peningkatan kualitas kinerja dan pengawasan pelayanan publik dalam bentuk penguatan pengawasan kinerja pelayanan publik.

Terkait dengan reformasi birokrasi dan tata kelola, dalam RPJMN 2020-2024 menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola, yakni:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;



2. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja organisasi, dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan public berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Selain itu di dalam agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan disebutkan bahwa salah satu arah kebijakannya adalah Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter diantaranya melalui Revolusi Mental. Dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif, mencakup:

1. Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya;
2. Penerapan disiplin, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) dalam birokrasi.

Pada Renstra Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi bidang aparatur RPJMN diatas, menetapkan visi *"Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen



ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN;
2. Penyelenggaraan manajemen ASN;
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN;
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN;
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN.

Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, yaitu:

1. Profesional
 - a. BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
 - b. BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.
2. Bermartabat
 - a. BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.
- c. Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip.

Sedangkan pada Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024, dalam rangka penataan aparatur juga telah menetapkan visi *“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”*, dengan misi:

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah, Terintegrasi dan Berbasis Elektronik.
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas.
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani.
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Adapun Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020-2024 dibidang kepegawaian adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera



yang dimaksud dengan terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera yaitu menciptakan ASN yang mampu menunjukkan mutu atau kualitasnya dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya, memegang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam bekerja dan melayani publik. Untuk mendukung keprofesionalitasan dan integritas ASN maka perlu diberikan tingkat kesejahteraan yang cukup yang tidak hanya berupa kompensasi material namun juga non material. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini akan dilihat dari:

1. Indeks Sistem Merit
2. Indeks Profesionalitas ASN

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah dalam rangka untuk merealisasikan tujuan yang ada dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Pada dasarnya tujuan BKPSDM Kabupaten Gresik sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten nomor 1 yaitu:

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance”

Adapun indikator kinerja tujuan adalah:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi



Dalam mendukung tujuan Kabupaten di atas, BKPSDM Kabupaten Gresik pada Renstra Tahun 2021-2026 telah menetapkan tujuan:

“Mewujudkan Manajemen SDM Aparatur Berbasis Sistem Merit Berdasarkan Good dan Clean Governance”

Adapun tujuan Ranwal Renja BKPSDM Tahun 2025 adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan Renstra dengan fokus pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Penataan dan Promosi Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai sistem merit;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepegawaian Berbasis *Online*;
3. Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Pegawai;
4. Meningkatnya Kompetensi ASN sehingga dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan penetapan sasaran BKPSDM yang tertuang pada Renstra Tahun 2021-2026, BKPSDM Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan sebagai berikut:

“Meningkatnya Sistem Tata Kelola SDM Aparatur yang Profesional dan Berbasis Sistem Merit dalam rangka Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas”

Dengan Indikator:

**Indeks Profesionalitas ASN
Indeks Sistem Merit**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Dalam pelaksanaannya pengukuran dilakukan Badan Kepegawaian Negara dengan peraturan



Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam pedoman tersebut diatur bobot pengukuran setiap dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Kualifikasi (25%) - mengukur kualifikasi Pendidikan formal dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
2. Dimensi Kompetensi (40%) - mengukur riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
3. Dimensi Kinerja (30%) - mengukur penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
4. Dimensi disiplin (5%)

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Namun demikian karena pada umumnya instansi pemerintah belum melakukan *updating* data pada aplikasi tersebut, maka untuk tahun 2019 pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan data penilaian mandiri yang disampaikan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan secara *offline*. Indeks Profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN.

Adapun Indeks Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM yang diukur dari 9 aspek yaitu: Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, penghargaan dan disiplin; Perlindungan; dan Pelayanan Sistem Informasi. Pengukuran Indeks Sistem Merit berdasarkan pada Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.



Setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian Mandiri melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dengan mengupload dokumen-dokumen sesuai Sub Indikator pada indikator aspek yang telah ditentukan. KASN akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen tersebut.

Adapun kategori penilaian Sistem Merit adalah sebagai berikut:

1. Kategori IV, nilai 325 – 400, dengan indeks 0,81 – 1, dengan sebutan Sangat Baik;
2. Kategori III, nilai 250 – 324, dengan indeks 0,61 – 0,8, dengan sebutan Baik;
3. Kategori II, nilai 175 – 249, dengan indeks 0,41 – 0,6, dengan sebutan Kurang;
4. Kategori I, nilai 100 – 174, dengan indeks 0,2 – 0,4, dengan sebutan Buruk.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

1. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu:
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
 - b. Pencapaian SDGs
 - c. Pengentasan kemiskinan
 - d. Pencapaian NSPK dan SPM
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - f. Pengembangan daerah terisolir



2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain:

BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 merencanakan 3 Program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah dan 2 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Gresik. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 5 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 5 Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 Sub Kegiatan
 - a) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Kepegawaian Daerah, terdiri dari 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan:
 - 1) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - b) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - c) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 2) Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari 3 Sub Kegiatan:
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - c) Pengelolaan Promosi ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari 4 Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
 - d) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan:



- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari 1 Sub Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari 2 Sub Kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
 - b) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Adapun rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Gresik

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				16.993.065.634,55				24.620.800.330
5.03	KEPEGAWAIAN				12.289.040.692,05				15.608.870.330
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				9.803.455.790,05				7.660.111.330
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.672.376,87				189.353.964
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Gresik	6 Dok	24.675.100,50	APBD		6 Dok	61.491.727
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Gresik	12 Lap	29.997.276,37	APBD		12 Lap	127.862.237
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.301.943.786,46				5.860.627.695
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Gresik	55 Pegawai	8.299.382.114,46	APBD		55 Pegawai	5.841.707.441
5.03.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Kab. Gresik	12 Lap	2.561.672,00	APBD		12 Lap	8.514.141

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		laporan keuangan akhir tahun SKPD							
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	Kab. Gresik	36 Lap	0	APBD		36 Lap	10.406.113
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.074.661.226,72				1.099.274.828
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Gresik	3 Paket	118.752.734,00	APBD		3 Paket	320.315.118
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Gresik	25 Paket	49.689.420,00	APBD		27 Paket	113.514.186
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Gresik	13 Paket	71.172.200,00	APBD		13 Paket	170.284.948
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Gresik	3 Dok	3.213.000,00	APBD		3 Dok	11.352.330
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Gresik	80 Lap	196.538.572,00	APBD		80 Lap	283.808.246
5.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen atas pelaksanaan SPBE	Kab. Gresik	1 Dok	635.295.300,72	APBD		1 Dok	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.134.000,00				175.015.085
5.03.01.2.08.04	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	Kab. Gresik	4 Lap	175.134.000,00	APBD		4 Lap	175.015.085
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				197.044.400,00				335.839.758
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Gresik	11 Kendaraan	189.724.400,00	APBD		11 Kendaraan	170.284.948
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Gresik	90 Kali	7.320.000,00	APBD		95 Kali	165.554.810
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.485.584.902,00				7.948.759.000
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN				434.451.578,00				1.930.025.416
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Kab. Gresik	3 Dok	315.502.265,00	APBD		3 Dok	1.297.259.584

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi	Kab. Gresik	1 Lembaga	36.051.400,00	APBD		1 Lembaga	398.864.065
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Gresik	2 Dok	82.897.913,00	APBD		2 Dok	233.901.767
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				865.522.834,00				2.599.171.827
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, mutasi jabatan administrasi, mutasi jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah	Kab. Gresik	4 Dok	39.845.646,00	APBD		4 Dok	449.337.604
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Gresik	28 Kali	171.022.400,00	APBD		28 Kali	589.463.228
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	Kab. Gresik	5 Dok	654.654.788,00	APBD		6 Dok	1.560.370.995
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				962.602.886,00				1.291.202.792
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	Kab. Gresik	5 Org	35.600.000,00	APBD		5 Org	41.202.792
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen pengelolaan Assessment Center	Kab. Gresik	1 Dok	785.602.886,00	APBD		1 Dok	500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen hasil Pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	Kab. Gresik	1 Dok	0	APBD		1 Dok	500.000.000
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang dibina	Kab. Gresik	1 Dok	141.400.000,00	APBD		1 Dok	250.000.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				223.007.604,00				2.128.358.965
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Gresik	3 Dok	12.198.014,00	APBD		3 Dok	319.337.464
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	Kab. Gresik	1.400 Org	202.309.590,00	APBD		1.400 Org	640.061.929
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	Kab. Gresik	95 Org	8.500.000,00	APBD		95 Org	1.095.095.856
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Kab. Gresik	5 Lap	0	APBD		5 Lap	73.863.716
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4.704.024.942,50				9.011.930.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				4.704.024.942,50				9.011.930.000
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				544.375.160,00				1.609.665.771
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan	Kab. Gresik	2 Kebijakan	544.375.160,00	APBD		2 Kebijakan	1.609.665.771

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang disusun							
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				4.159.649.782,50				7.402.264.229
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Gresik	2 Lap	4.159.649.782,50	APBD		2 Lap	7.402.264.229



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra BKPSDM serta untuk mendukung tercapainya tujuan BKPSDM pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Gresik pada Umumnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.8
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Gresik
Tahun 2025

No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penangg ung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah		Pagu Indikatif (Rp)
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				18.004.873.588,00	19.227.278.025,46	16.993.065.634,55					22.087.617.886,00	BKPSDM
5.03	KEPEGAWAIAN				11.766.075.235,00	12.976.050.716,46	12.289.040.692,05					15.387.617.886,00	BKPSDM
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.869.963.003,00	10.202.008.818,46	9.803.455.790,05					10.074.500.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92.632.370,00	92.037.627,28	92.037.627,28			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	260.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	27.175.158,00	30.021.000,00	24.675.100,50	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	30.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	65.457.212,00	62.016.627,28	29.997.276,37	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data	230.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											pembangunan		
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.080.739.349,00	8.303.143.786,46	8.303.143.786,46			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	7.706.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	7.076.977.677,00	8.299.382.114,46	8.299.382.114,46	Kab. Gresik	PAD DAU	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	7.700.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Lap	12 Lap	3.761.672,00	3.761.672,00	2.561.672,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	6.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.324.412.884,00	1.434.649.004,72	1.434.649.004,72			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart	1.591.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											Governance berbasis satu data pembangunan		
5.03.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	112.075.584,00	135.360.884,00	118.752.734,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	200.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	59.361.550,00	59.361.550,00	49.689.420,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	90.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	81.015.250,00	81.015.250,00	71.172.200,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	92.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3 Dok	3.213.000,00	3.213.000,00	3.213.000,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan	9.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Lap	80 Lap	535.493.000,00	519.230.020,00	196.538.572,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	400.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	533.254.500,00	636.468.300,72	635.295.300,72	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	800.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				175.134.000,00	175.134.000,00	175.134.000,00				Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	259.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4 Lap	4 Lap	175.134.000,00	175.134.000,00	175.134.000,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung	259.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kantor yang Disediakan									elayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.044.400,00	197.044.400,00	197.044.400,00				Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	258.500.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	189.724.400,00	189.724.400,00	189.724.400,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	250.000.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	8.500.000,00	BKPSDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN				2.896.112.232,00	2.774.041.898,00	2.485.584.902,00					5.313.117.886,00	



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangk t Daerah Penangg ung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.02.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				673.979.726,00	673.979.726,00	673.979.726,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	1.130.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.01.002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dok	3 Dok	567.084.166,00	567.084.166,00	315.502.265,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	900.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.01.008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	49.999.734,00	52.689.400,00	36.051.400,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	110.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	56.895.826,00	56.895.826,00	82.897.913,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data	120.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangk t Daerah Penangg ung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											pembangunan		
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				694.641.034,00	694.641.034,00	694.641.034,00				Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	1.050.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dok	4 Dok	66.499.796,00	66.499.796,00	39.845.646,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	300.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	28 Dok	28 Dok	196.596.450,00	196.596.450,00	171.022.400,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	250.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dok	2 Dok	431.544.788,00	431.544.788,00	654.654.788,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart	500.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggg ung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											Governance berbasis satu data pembangunan		
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				1.214.912.886,00	1.112.112.886,00	1.112.112.886,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	2.493.117.886,00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .0001	2.493.117.886,00	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang	5 Orang	36.400.000,00	36.400.000,00	35.600.000,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	45.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dok	1 Dok	888.512.886,00	888.512.886,00	785.602.886,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	948.117.886,00	BKPSDM
5.03.02.2.03 .0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan	100.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
5.03.02.2.03 .0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	180 Orang	30 Orang	290.000.000,00	187.200.000,00	141.400.000,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	1.400.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				312.578.586,00	290.618.586,00	290.618.586,00				Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	640.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.04 .0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dok	3 Dok	19.478.514,00	19.478.514,00	12.198.014,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	50.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.04 .0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Pengharqaan	1400 Orang	1400 Orang	239.104.580,00	239.104.580,00	202.309.590,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung	450.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											elayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
5.03.02.2.04 .0007	Pembinaan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	95 Orang	95 Orang	46.374.277,00	24.414.277,00	8.500.000	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	120.000.000,00	BKPSDM
5.03.02.2.04 .0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	5 Laporan	7.621.215,00	7.621.215,00	0,00	Kab. Gresik	PAD	-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	20.000.000,00	BKPSDM
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.238.798.353,00	6.251.227.309,00	4.704.024.942,50					6.700.000.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.238.798.353,00	6.251.227.309,00	4.704.024.942,50					6.700.000.000,00	
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis				717.082.444,00	717.082.444,00	717.082.400,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data	1.200.000.000,00	BKPSDM



No Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	
											pembangunan		
5.04.02.2.01 .0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	180 Orang	180 Orang	717.082.444,00	717.082.444,00	717.082.400,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	1.200.000.000,00	BKPSDM
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5.521.715.909,00	5.534.144.909,00	5.534.144.909,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	5.500.000.000,00	BKPSDM
5.04.02.2.02 .0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Lap	4 Lap	5.521.715.909,00	5.534.144.909,00	5.534.144.909,00			-	Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan	5.500.000.000,00	BKPSDM
JUMLAH					18.004.873.588,00	19.227.278.025,46	16.993.065.634,55						

BAB V

PENUTUP

Sebagai kesimpulan pada Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian khususnya kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, selanjutnya akan dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 2025 melalui Rapat Forum SKPD, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan BKPSDM Kabupaten Gresik dapat mempelajari untuk selanjutnya dijadikan acuan dan arahan operasionalisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.



5.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 akan dijadikan dasar penyusunan Ranwal Renja Tahun 2026 dan salah satu bahan pengukuran dan evaluasi kinerja serta menjadi dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2023;
2. Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Gresik Tahun 2025 diharapkan dapat membangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisten dalam perencanaan pembangunan untuk kebaikan bersama.